



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kapten F. Tendean Telp/Fax (0711) 354715 – 370030
Palembang Kode Pos 31129

Palembang, 01 September 2026

Kepada Yth.
Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan
di-

Palembang

SURAT PENGANTAR

Nomor: 2925 /050/Ban.KBP/2026

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Dokumen Perbaikan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	1 (satu) Exemplar	Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031991011002



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2026

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	6
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	12
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	12
3.2. Rincian Komponen Belanja	12
3.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	14
3.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci ...	15
 BAB IV PENUTUP	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2026 dan Pencapaian Renstra	7
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026	11
 Tabel 3.1 Rencana Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	 13
3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2026	14
3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026.....	15
3.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026	16

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-nya, Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Renja Perubahan Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa penyesuaian terhadap target kinerja pada program, kegiatan dan subkegiatan tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan kebutuhan pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Melalui penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026 ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin terarah, terukur dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami berharap Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Palembang, 01 September 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031991011002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan Renja, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta kebutuhan penyesuaian target kinerja dan pendanaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pelaksanaan urusan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan dan konflik sosial.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 pada awalnya telah disusun sebagai penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaan tahun berjalan terdapat kemungkinan terjadinya perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan pemerintah, perubahan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan target kinerja, perkembangan kondisi sosial dan politik daerah, serta perubahan kemampuan pendanaan daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyesuaian perencanaan tahunan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II. Renja Perubahan tidak dimaksudkan untuk mengubah arah strategis perangkat daerah secara keseluruhan, melainkan sebagai instrumen untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja agar lebih responsif terhadap perkembangan kondisi aktual dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Renja Perubahan Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Melalui penyesuaian yang didasarkan pada hasil evaluasi dan kebutuhan aktual, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung terciptanya stabilitas politik dan keamanan daerah, meningkatnya kualitas demokrasi, terpeliharanya kerukunan masyarakat, meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta meningkatnya kemampuan daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial.

Dengan demikian, Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterkaitan yang jelas antara perencanaan, target kinerja, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta hasil yang ingin dicapai.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026 sekurang-kurangnya memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105).
2. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435).
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185).
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai

dengan Triwulan II Tahun 2026 serta memperhatikan perkembangan kebijakan, kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pencapaian target kinerja dan kemampuan pendanaan daerah.

Renja Perubahan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 tetap berada dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
2. Mengetahui tingkat pencapaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
3. Mengetahui tingkat realisasi dan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II;
4. Mengidentifikasi permasalahan, kendala dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
5. Menentukan langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun;
6. Melakukan penyesuaian terhadap rencana program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan kebutuhan aktual;
7. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja apabila berdasarkan hasil evaluasi diperlukan perubahan;
8. Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
9. Menjaga keselarasan Renja Perubahan dengan perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
10. Menjaga konsistensi antara Renja Perubahan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
11. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; dan

12. Menjadi pedoman pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang memberikan gambaran mengenai proses evaluasi pelaksanaan rencana kerja, perumusan tujuan dan sasaran, penyusunan rencana kerja dan pendanaan perubahan, serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Perubahan Tahun 2026.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026, memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja, pencapaian kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap perubahan RKPD, serta penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta target kinerja dan pendanaan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kebijakan.

BAB IV PENUTUP, memuat kesimpulan, catatan penting, kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2026.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian dari proses pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja dan pendanaan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi perubahan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap Renja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian dalam Renja Perubahan, terdapat beberapa indikator program yang mengalami perubahan target. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual pelaksanaan kegiatan, kebutuhan masyarakat, kemampuan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun, serta kesesuaian antara target kinerja dengan dukungan pendanaan.

Secara keseluruhan, perubahan target tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penyesuaian dilakukan agar target yang ditetapkan dapat dicapai secara lebih realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.1 (T-C.29)
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II
Tahun 2026 dan Pencapaian Renstra

No	Program	TARGET 2026 (%)	Realisasi Kinerja s.d TW II (%)	Realisasi Keuangan s.d TW II	
				(Rp.)	(%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	100	100	5.138.287.833,-	50,36
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	78,5	78,5	791.763.794,-	17,73
3.	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	80	80	2.316.843.489,-	15,85
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5	5	4.595.586,-	3,37
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	100	22.013.208,-	15,72
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	80	80	52.852.116,-	16,83
TOTAL				8.326.356.026,-	27,87

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mencakup 6 program dan 39 subkegiatan. Secara umum, indikator kinerja program telah mencapai target yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2026. Dari sisi pendanaan, realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II mencapai Rp. 8.326.356.026,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh enam rupiah) atau 27,87% dari total pagu Rp. 29.873.819.776,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 50%. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2026.

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan gambaran keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kinerja pelayanan diarahkan pada penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas pendidikan politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, penguatan ketahanan sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan kerukunan masyarakat, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan kemampuan daerah dalam mencegah dan menangani konflik sosial.

Indikator kinerja pelayanan yang menjadi perhatian dalam Renja Perubahan Tahun 2026 antara lain Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target 78,5%, Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik dengan target 80%, Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif dengan target 5%, Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi kerukunan yang dilaksanakan dengan target 100%, serta Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan dengan target 80%.

Pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala berdasarkan data pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung yang tersedia. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, hasil pengukuran kinerja pelayanan perlu dikaitkan secara langsung dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, data realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 perlu didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi pencapaian target sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Satuan	Target	Capaian s.d TW II	Keterangan
1.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	78,5	78,5	Tercapai
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	%	80	80	Tercapai
3.	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	%	5	5	Tercapai
4.	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Fasilitasi Kerukunan yang Dilaksanakan	%	100	100	Tercapai
5.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	80	80	Tercapai

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa indikator pelayanan yang digunakan dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pendidikan politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, penguatan ketahanan sosial budaya dan kerukunan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Selanjutnya, pencapaian kinerja pelayanan perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta percepatan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa isu penting

yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2026.

1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan perlu terus ditingkatkan sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Penyebaran informasi yang cepat dapat memberikan dampak positif sekaligus menimbulkan potensi penyebaran paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Peningkatan kualitas pendidikan politik dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung kehidupan demokrasi yang sehat. Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.
3. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan secara terkoordinasi agar keberadaan organisasi kemasyarakatan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
4. Dinamika sosial, ekonomi dan budaya serta keberagaman masyarakat Sumatera Selatan memerlukan penguatan ketahanan masyarakat dan kerukunan. Koordinasi dan fasilitasi lintas sektor perlu ditingkatkan untuk mencegah berkembangnya potensi permasalahan sosial.
5. Kewaspadaan nasional dan pencegahan konflik sosial merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Pelaksanaan deteksi dini, pemantauan perkembangan situasi, koordinasi antarinstansi dan fasilitasi penyelesaian konflik perlu dilakukan secara cepat, tepat dan terukur.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

Review terhadap perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan keselarasan antara rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan perubahan arah kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah. Hasil review menunjukkan

bahwa perubahan Renja Tahun 2026 tetap diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik. Perubahan yang dilakukan terutama berupa penyesuaian target kinerja beberapa program dan subkegiatan serta penyesuaian distribusi pendanaan.

Tabel 2.3 (T.C-31)

Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

NO	Program	Indikator Kinerja	Target Sebelum	Target Sesudah	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	70%	78,5%	Penyesuaian target dilakukan untuk meningkatkan cakupan pencapaian program sampai dengan akhir Tahun 2026
2.	Program Pendidikan Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Masyarakat	80%	80%	Target program tetap, namun terdapat penyesuaian pada beberapa target subkegiatan sesuai kebutuhan pelaksanaan
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	4%	5%	Penyesuaian target diarahkan untuk meningkatkan capaian pemberdayaan dan keaktifan organisasi kemasyarakatan
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan bidang ketahanan sosial budaya dan fasilitasi kerukunan yang dilaksanakan	25%	100%	Penyesuaian target dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta fasilitasi kerukunan
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	80%	Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi actual dan karakteristik penanganan konflik sosial sampai dengan akhir tahun.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Penelaahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tetap sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang perlu diakomodasi dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Oleh karena itu, tidak terdapat tambahan program, kegiatan maupun subkegiatan yang bersumber dari usulan pemangku kepentingan.

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2026 tetap mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, hasil penelaahan terhadap perubahan RKPD Tahun 2026, serta penyesuaian target dan pendanaan sesuai kondisi aktual. Dengan demikian, pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2026 diharapkan tetap terarah, efektif dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dengan tidak adanya usulan, maka pada bab ini tidak memuat Tabel T.C-32.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta hasil review terhadap perubahan RKPD. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan dukungan pendanaan terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi prioritas sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil perubahan, total pagu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan bertambah sebesar Rp. 2.805.062.288,- (dua miliar delapan ratus lima juta enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari semula Rp. 29.873.819.776,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi Rp. 32.678.882.064,- (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah).

3.2. Rincian Komponen Belanja

Rincian komponen belanja dalam Renja Perubahan Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pendanaan Perangkat Daerah. Penyusunan rincian belanja harus memastikan adanya kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja dan kebutuhan anggaran.

Tabel 3.1
Rencana Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2026

NO	Program	Pagu Sebelum (Rp)	Pagu Sesudah (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.203.694.973,-	9.658.757.261,-	(544.937.712,-)	Mengalami pengurangan pagu
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.465.800.000,-	7.815.800.000,-	3.350.000.000,-	Mengalami penambahan pagu
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	14.614.044.889,-	14.614.044.889,-	0	Tidak mengalami perubahan pagu
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	136.300.000,-	136.300.000,-	0	Tidak mengalami perubahan pagu
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	140.000.000,-	140.000.000,-	0	Tidak mengalami perubahan pagu
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	313.979.914,-	313.979.914,-	0	Tidak mengalami perubahan pagu
TOTAL		29.873.819.776,-	32.678.882.064,-	2.805.062.288,-	Mengalami penambahan pagu

Berdasarkan hasil review, terdapat perubahan alokasi pendanaan pada beberapa program. Secara keseluruhan, pagu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mengalami penambahan sebesar Rp. 2.805.062.288,- (dua miliar delapan ratus lima juta enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dari Rp. 29.873.819.776,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi Rp. 32.678.882.064,- (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu

enam puluh empat rupiah). Penyesuaian pendanaan tersebut diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, perubahan Renja Tahun 2026 telah diselaraskan dengan perubahan RKPD serta kebutuhan aktual pelaksanaan program dan kegiatan, dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, keterukuran target kinerja dan kemampuan pencapaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

3.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan bagian dari penjabaran Renstra Tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan serta penetapan indikator kinerja. Sasaran perangkat daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat dan penguatan ketenteraman dimasyarakat. Dalam dokumen Renja yang menjadi dasar, indikator strategis mencakup Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Harmoni Indonesia. Target tahun 2026 dalam dokumen tersebut tercantum masing-masing sebesar 82,48 untuk IDI, 78,15 untuk IKUB dan 6,6 untuk IHAI.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian
Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	82,48
Penguatan Ketenteraman di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,15
	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	6,6

Target kinerja tersebut menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaiannya memerlukan dukungan dan

koordinasi dari berbagai pihak karena indikator outcome tidak hanya dipengaruhi oleh satu kegiatan atau satu Perangkat Daerah, tetapi merupakan hasil dari berbagai intervensi dan sinergi pembangunan.

3.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Dalam dokumen Renja yang menjadi dasar penyusunan, IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Harmoni Indonesia (IHAI), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang menggambarkan kondisi outcome penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik. Pencapaian indikator tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2026
1.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	82,48
2.	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	78,15
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	6,6

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, dapat diketahui bahwa IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Penetapan IKU menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah memiliki arah yang jelas serta dapat diukur berdasarkan hasil yang ingin dicapai.

Selain IKU, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menggunakan Indikator Kinerja Kunci sebagai indikator yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam dokumen Renja yang menjadi dasar, IKK antara lain berkaitan dengan persentase pendidikan politik pada kader partai politik, cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif, pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan sosial dan budaya serta fasilitasi kerukunan umat beragama, dan persentase konflik sosial yang diselesaikan.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2026
1.	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Indeks	78,5
2.	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Indeks	80
3.	Persentase organisasi masyarakat yang aktif	Indeks	5
4.	Persentase kebijakan di bidang ketahanan, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Indeks	100
5.	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Indeks	80

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) di atas, dapat diketahui bahwa IKK digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. IKK memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik melalui indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka pencapaian IKK, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Selatan terus melakukan penguatan koordinasi, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pemantauan terhadap perkembangan capaian serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Dengan demikian, IKK diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perubahan kebijakan serta kemampuan pendanaan daerah. Renja Perubahan menjadi instrumen penting dalam memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 tetap berada dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Dengan adanya dokumen Renja Perubahan, diharapkan terdapat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Setiap program dan kegiatan diharapkan memiliki target yang jelas, pendanaan yang memadai dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaannya.

Palembang, 01 September 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031991011002

LAMPIRAN

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RKP
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027**

Urusan : 8.01 Unsur Pemerintahan Umum
Organisasi : 8-1.0-0.0-0.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	CATATAN PEMBAHASAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	10.203.694.973	9.658.757.261			100%	11.590.508.713			(544.937.712)		
8.01.01.1.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	7 Dokumen	74.300.000	74.300.000			7 Dokumen	89.160.000	Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	-		
8.01.01.1.01.0001	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	4 Dokumen	4 Dokumen	12.500.000	12.500.000	PAD		3 Dokumen	15.000.000			-		
8.01.01.1.01.0006	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	3 Laporan	3 Laporan	61.800.000	61.800.000	PAD		4 Laporan	74.160.000			-		
8.01.01.1.02	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	7.371.582.712	6.826.645.000			100%	8.191.974.000	Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	(544.937.712)		
8.01.01.1.02.0001	2.3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	53 Orang	53 Orang	6.989.082.712	6.444.145.000	DAU		44 Orang	7.732.974.000			(544.937.712)		
8.01.01.1.02.0003	2.4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	344.000.000	344.000.000	PAD		1 Dokumen	412.800.000			-		
8.01.01.1.02.0004	2.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000	21.000.000	PAD		1 Dokumen	25.200.000			-		
8.01.01.1.02.0005	2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	PAD		1 Laporan	12.000.000			-		
8.01.01.1.02.0007	2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	7.500.000	PAD		1 Laporan	9.000.000			-		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	CATATAN PEMBAHASAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.1.05	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	35.814.000	14.814.000			100%	17.776.800	Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	(21.000.000)		
8.01.01.1.05.0009	3.8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	1 Orang	1 Orang	35.814.000	14.814.000	PAD		8 Orang	17.776.800			(21.000.000)		
8.01.01.1.06	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah		100%	100%	406.760.180	460.760.180			100%	552.912.216	Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	54.000.000		
8.01.01.1.06.0001	4.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	1 Paket	40.000.000	90.000.000	PAD		1 Paket	108.000.000			50.000.000		
8.01.01.1.06.0004	4.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	1 Paket	110.000.000	140.000.000	PAD		1 Paket	168.000.000			30.000.000		
8.01.01.1.06.0005	4.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	1 Paket	1 Paket	70.000.000	70.000.000	PAD		1 Paket	84.000.000			-		
8.01.01.1.06.0006	4.12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	-	PAD		1 Dokumen	-			(20.000.000)		
8.01.01.1.06.0009	4.13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	1 Laporan	1 Laporan	160.760.180	160.760.180	PAD		1 Laporan	192.912.216			-		
8.01.01.1.06.0011	4.14 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	-	PAD		1 Dokumen	-			(6.000.000)		
8.01.01.1.07	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		25 Jenis	25 Jenis	150.000.000	-			25 Jenis	-	Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	(150.000.000)		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	CATATAN PEMBAHASAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.1.07.0006	5.15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Palembang	36 Unit	36 Unit	150.000.000	-	PAD		82 Unit	-			(150.000.000)		
8.01.01.1.08	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 Persen	1.560.238.081	1.448.238.081			100 Persen	1.737.885.697	Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	(112.000.000)		
8.01.01.1.08.0001	6.16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	5.000.000	PAD		1 Laporan	6.000.000			(3.000.000)		
8.01.01.1.08.0002	6.17 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	1 Laporan	311.265.881	291.265.881	PAD		1 Laporan	349.519.057			(20.000.000)		
8.01.01.1.08.0004	6.18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	1 Laporan	1.240.972.200	1.151.972.200	PAD		1 Laporan	1.382.366.640			(89.000.000)		
8.01.01.1.09	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah		100 Persen	100 Persen	605.000.000	834.000.000			100 Persen	1.000.800.000	Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pemerintahan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	229.000.000		
8.01.01.1.09.0002	7.19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	36 Unit	36 Unit	400.000.000	609.000.000	PAD		34 Unit	730.800.000			209.000.000		
8.01.01.1.09.0009	7.20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	1 Unit	1 Unit	145.000.000	145.000.000	PAD		1 Unit	174.000.000			-		
8.01.01.1.09.0011	7.21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	25 Unit	25 Unit	60.000.000	80.000.000	PAD		25 Unit	96.000.000			20.000.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	CATATAN PEMBAHASAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.02	II Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70,0%	78,5%	4.465.800.000	7.815.800.000			78,5%	9.378.960.000			3.350.000.000		
8.01.02.2.01	8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		4 Dokumen	5 Dokumen	4.465.800.000	7.815.800.000	PAD		6 Dokumen	9.378.960.000	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	#####		
8.01.02.2.01.0003	8.22 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Sumsel	250 Orang	250 Orang	101.600.000	101.600.000	PAD		250 Orang	121.920.000					
8.01.02.2.01.0004	8.23 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Sumsel	100 Orang	100 Orang		3.350.000.000	PAD		100 Orang	4.020.000.000			3.350.000.000		
8.01.02.2.01.0005	8.24 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Sumsel	1 Laporan	1 Laporan	24.200.000	24.200.000	PAD		1 Laporan	29.040.000					
8.01.02.2.01.0008	8.25 Pembentukan Pakibraka	- Jumlah Peserta Paskibraka Sumatera Selatan	Prov. Sumsel	52 Orang	52 Orang	4.340.000.000	4.340.000.000	PAD		52 Orang	5.208.000.000					
8.01.03	III Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		80%	80%	14.614.044.889	14.614.044.889			80%	17.536.853.867					
8.01.03.2.01	9. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik		5 Dokumen	5 Dokumen	14.614.044.889	14.614.044.889			7 Dokumen	17.536.853.867	Peningkatan Kualitas SDM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	CATATAN PEMBAHASAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.03.2.01.0001	9.26	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Sumsel	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	PAD		2 Dokumen	24.000.000					
8.01.03.2.01.0002	9.27	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Sumsel	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	133.216.794 14.340.891.000	133.216.794 14.340.891.000	PAD Hibah Parpol		1 Dokumen 1 Dokumen	159.860.153 17.209.069.200					
8.01.03.2.01.0003	9.28	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Sumsel	150 Orang	100 Orang	26.449.212	26.449.212	PAD		100 Orang	31.739.054					
8.01.03.2.01.0004	9.29	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Sumsel	550 Orang	640 Orang	58.487.883	58.487.883	PAD		640 Orang	70.185.460					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	CATATAN PEMBAHASAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.03.2.01.0005	9.30 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Sumsel	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	35.000.000	PAD		1 Laporan	42.000.000					
8.01.04	IV Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif		4%	5%	136.300.000	136.300.000			5%	163.560.000					
8.01.04.2.01	10. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		2 Dokumen	2 Dokumen	136.300.000	136.300.000			3 Dokumen	163.560.000	Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Kehidupan Sosial	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
8.01.04.2.01.0004	10.31 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Sumsel	200 Orang	200 Orang	54.300.000	54.300.000	PAD Dana Hibah		200 Orang 1 Organisasi	65.160.000					
8.01.04.2.01.0005	10.32 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Sumsel	1 Laporan	1 Laporan	82.000.000	82.000.000	PAD		1 Laporan	98.400.000					
8.01.05	V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		25%	100%	140.000.000	140.000.000			100%	168.000.000					
8.01.05.2.01	11. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya		2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000	140.000.000			3 Dokumen	168.000.000	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
8.01.05.2.01.0003	11.33 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Sumsel	100 Orang	50 Orang	70.000.000	70.000.000	PAD		600 Orang	84.000.000					

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	CATATAN PEMBAHASAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.05.2.01.0004	11.34 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Sumsel	100 Orang	50 Orang	70.000.000	70.000.000	PAD		600 Orang	84.000.000					
8.01.06	VI Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100%	80%	313.979.914	313.979.914			80%	376.775.897					
8.01.06.2.01	12. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		6 Dokumen	6 Dokumen	313.979.914	313.979.914			6 Dokumen	376.775.897	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
8.01.06.2.01.0001	12.36 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Sumsel	1 Dokumen	1 Dokumen	37.484.959	37.484.959	PAD		1 Dokumen	44.961.951					
8.01.06.2.01.0002	12.37 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Prov. Sumsel	3 Dokumen	3 Dokumen	30.748.750	81.117.160	PAD		3 Dokumen	97.340.592			50.368.410		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET.	CATATAN PEMBAHASAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF					
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.06.2.01.0003	12.38 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Orang yang melaksanakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Sumsel	200 Orang	100 Orang	41.500.000	18.000.000	PAD		100 Orang	21.600.000			(23.500.000)		
8.01.06.2.01.0004	12.39 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Sumsel	200 Orang	100 Orang	59.596.205	32.727.795	PAD		200 Orang	39.273.354			(26.868.410)		
8.01.06.2.01.0005	12.40 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Sumsel	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	PAD		1 Laporan	30.000.000					
8.01.06.2.01.0006	12.41 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	1 Dokumen	1 Dokumen	119.650.000	119.650.000	PAD		1 Dokumen	143.580.000					
Jumlah						29.873.819.776	32.678.882.064				39.214.658.477			2.805.062.288		

Palembang, 01 September 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

